

RELASI PEMERINTAH-GERAKAN SOSIAL: STUDI PADA GERAKAN LINGKUNGAN JELANTAH4CHANGE

Jurnal Analisa Sosiologi

Juli 2022, 11 (3):383 - 404

Muhammad Wahyudi¹

Abstract

Most recent studies on social movement assume that collective action carried out outside established institutions takes a position to challenge political authority or government. Within this framework, the conflict between social movement and government is inevitable. Nevertheless, it is possible for social movement to carry out their missions without having to conflict with political authorities. In other words, social movement can collaborate with the government, for instance around the issue of environmental protection. In this regard, this study aims to analyze and to describe the relationship between the government and environmental protection movements around the campaign of Jelantah4Change. This research employed a descriptive qualitative approach with the methods of observation, interviews, and document studies. The study was analyzed based on the social movement perspective of Giugni and Passy (1998). The result demonstrates that the interaction occurs between the government and Jelantah4Change is still in a form of consensus. In the future, the interaction between the two parties needs to be carried out in the form of collaborative action.

Keywords: *Government, Social Movement, Environment, Jelantah4Change*

Abstrak

Kebanyakan studi mengenai gerakan sosial mendasarkan asumsinya bahwa aksi kolektif yang dilakukan di luar institusi-institusi mapan mengambil posisi menantang otoritas politik atau pemerintah. Dalam kerangka ini, konflik antara gerakan sosial dan pemerintah menjadi tak terhindarkan. Namun, harus diketahui juga, bahwa ada gerakan sosial yang menjalankan misinya tanpa harus berkonflik dengan otoritas politik. Dengan kata lain, gerakan sosial bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Penyelamatan lingkungan menjadi salah satu area dimana gerakan sosial bisa bekerja sama dengan pemerintah. Terkait itu, studi ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan relasi yang terjadi antara pemerintah dan gerakan sosial yang fokus pada perlindungan lingkungan. Studi dilakukan terhadap gerakan Jelantah4Change. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian dianalisis berdasarkan perspektif gerakan sosial dari Giugni & Passy (1998). Hasilnya adalah interaksi yang terjadi antara pemerintah dan

¹ Program Studi Magister Sosiologi Universitas Indonesia

¹ Email Korespondensi: muhammad.wahyudi01@ui.ac.id

Jelantah4Change masih bersifat konsensus. Ke depan, interaksi antara keduanya perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan kolaboratif.

Kata Kunci: Pemerintah, Gerakan Sosial, Lingkungan, Jelantah4Change

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar dibandingkan dari negara Lain. Dengan demikian, sudah sewajarnya, Indonesia menjadi sentra penghasil komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit (Alatas, 2015). Ermawati & Saptia (2013), mengutip data Kementerian Pertanian, mengungkapkan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 7,7 persen per tahun pada 2008-2012. Sementara, di periode yang sama, karet hanya mengalami pertumbuhan produksi sebesar 2,95 persen, lada 2,33 persen, cengkeh 2,69 persen, dan kakao sebesar 3,11 persen.

Dengan tingkat produksi kelapa sawit yang tinggi, tak heran jika Indonesia menjadi negara pengekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Ekspor minyak sawit nasional sepanjang 2019 mencapai USD 19 miliar atau turun 17,39 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar USD 23 miliar (Advent et al., 2021).

Selain itu, CPO juga dikonsumsi di dalam negeri. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sekitar 271,34 juta jiwa per Desember 2020 (Cahyono, 2022), Indonesia menjadi konsumen minyak goreng terbesar sejagat. Data United States Department of Agriculture atau USDA (2019), seperti dihimpun Katadata, menunjukkan pemakaian minyak sawit di Tanah Air mencapai sekira 13 juta ton atau 16,2 juta kiloliter atau setara 17 persen dari total konsumsi minyak sawit di dunia yang menyentuh 74,48 juta ton. Konsumsi ini meningkat sekira 1 persen ketimbang tahun sebelumnya yang berkisar 12,63 juta ton.

Sebagai pembanding, India dan Cina yang dihuni lebih dari 1 miliar jiwa mengonsumsi minyak sawit dengan kuantitas jauh di bawah Indonesia.

Pemanfaatan minyak sawit India hanya berkisar 10,19 juta ton atau 13,68 persen dari total konsumsi dunia. Sedangkan pemakaian minyak sawit di Cina cuma sekira 7,22 juta ton atau sekitar 9,7 persen dari total konsumsi dunia. Selain itu, Malaysia yang notabene merupakan salah satu produser minyak sawit mentah terbesar di dunia hanya mengonsumsi sebanyak 3,69 juta ton.

Konsekuensi sebagai negara dengan konsumsi minyak goreng sawit terbesar di dunia adalah Indonesia secara otomatis menjadi penghasil jelantah nomor wahid di mayapada. Sejatinya, minyak goreng bekas pakai ini bisa diolah kembali menjadi komoditas bernilai ekonomis. Sebaliknya, jika tak dikelola dengan baik, jelantah akan berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sayangnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang belum bisa mengoptimalkan potensi ekonomi dari minyak jelantah. Berdasarkan kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K dan Traction Energi Asia (2019), Indonesia baru mampu menghimpun sebanyak 3 juta kiloliter jelantah atau hanya 18,5 persen dari total konsumsi minyak goreng sawit nasional. Sebanyak 1,6 juta kiloliter diantaranya berasal dari rumah tangga di berbagai kota besar di Tanah Air.

Jika dikalkulasi, setidaknya, ada 13,2 juta kiloliter jelantah masih beredar di masyarakat yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga. Tak sedikit masyarakat yang masih memiliki kebiasaan membuang jelantah ke tanah atau perairan, seperti yang terjadi di Balikpapan. Fransisca (dalam Adhani & Fatmawati, 2019) menguraikan, jelantah yang dibuang ke perairan dapat merusak ekosistem perairan dan memusnahkan biota-biota yang ada di dalamnya. Ini lantaran sinar matahari tidak bisa menembus permukaan air yang tertutup lapisan minyak. Sedangkan jelantah yang dibuang di daratan akan merusak kesuburan tanah.

Selain itu, masyarakat juga masih memiliki kebiasaan memanfaatkan jelantah untuk menggoreng makanan. Idealnya, minyak goreng hanya

digunakan untuk sekali pakai (Rahayu et al. 2020). Pemanfaatan minyak goreng yang sama untuk memasak lebih dari tiga kali berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Ardhanay & Lamsiyah (2018), mengutip Syafiq, menjelaskan minyak goreng bekas pakai atau jelantah mengandung asam lemak jenuh tinggi yang dapat memicu penyakit jantung koroner, stroke, meningkatnya kadar lipida utamanya kolesterol darah, hipertensi, dan kanker.

Untuk mengeliminasi risiko degradasi lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat itulah, konsep sedekah jelantah perlahan diperkenalkan di Indonesia. Program sedekah jelantah ditujukan agar lebih banyak lagi masyarakat mengerti membuang minyak goreng bekas pakai secara sembarangan dapat mencemari tanah dan air (Indrawijaya et al., 2020). Salah satu pihak yang memperkenalkan sedekah jelantah adalah komunitas Jelantah4Change hadir. Gerakan sosial yang lahir pada 26 Desember 2015 itu berinisiatif memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan limbah jelantah demi pelestarian lingkungan. Sebagaimana gerakan sosial pada umumnya, eksistensi dan keberhasilan aktivisme lingkungan—semacam Jelantah4Change—dalam mencapai tujuannya tak terlepas dari interaksinya dengan institusi politik.

Berdasarkan itu, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan sejauhmana relasi yang terbangun antara gerakan Jelantah4Change dan pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan dan masyarakat dari bahaya limbah jelantah? Dan, bagaimana relasi yang seharusnya terjadi antara keduanya dalam upaya melindungi lingkungan dan masyarakat dari bahaya limbah jelantah?

Peneliti berargumen bahwa pemerintah sudah semestinya aktif berkolaborasi dengan organisasi gerakan sosial, semacam Jelantah4Change, dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ada sejumlah studi yang menyinggung relasi antara institusi politik dan gerakan sosial yang fokus pada persoalan lingkungan di Tanah Air.

Antara lain, studi mengenai dinamika gerakan sosial dalam memerjuangkan keadilan lingkungan di Samarinda (Rahman, Slamet, dan Haryono, 2018). Mereka menemukan bahwa obral izin pertambangan batu bara di Ibu Kota Kalimantan Timur yang berujung pada kerusakan lingkungan melahirkan Gerakan Samarinda Menggugat. Gerakan tersebut melayangkan gugatan kepada Pemerintah Kota Samarinda lantaran dinilai serampangan dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kemudian, kajian mengenai kebijakan pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar (Arifin dan Sunardi, 2019). Mereka menyimpulkan bahwa gerakan sosial muncul sebagai reaksi atas tata kelola pertambangan yang buruk oleh pemerintah daerah. Lalu, studi terkait gerakan penyelamatan lingkungan dari bahaya eksplorasi tambang di Sangasanga, Kutai Kartanagara (Asfianur et al., 2020).

Selain itu, ada juga penelitian Nining Nia Kodarningsih (2019) terkait gerakan Hutan Itu Indonesia (HII). Gerakan ini lebih memilih pendekatan reformatif yang berorientasi pada perubahan kultural di masyarakat ketimbang menyerang kebijakan pemerintah. Gerakan ini bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan alam, khususnya hutan. Terakhir, studi terkait No Straw Movement atau gerakan tanpa sedotan sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan (Fatia dan Sugandi, 2019)

Secara umum, tiga studi pertama mewakili perspektif yang berkembang di masyarakat bahwa gerakan sosial umumnya mengambil posisi oposisi atau menantang hegemoni penguasa. Sementara dua studi terakhir menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak melulu identik dengan contentious politics atau politik berbasis konflik. Gerakan Hutan Itu Indonesia dan No Straw Movement terlihat mengambil jarak dengan pemerintah. Mereka tidak melakukan aksi perlawanan atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait isu kehutanan dan limbah plastik, terutama sedotan. Mereka juga tidak berkolaborasi dengan pemerintah.

Berbeda dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang cenderung menulis gerakan sosial yang tidak bersentuhan atau bahkan bertentangan dengan otoritas politik, studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan potensi kolaborasi antara pemerintah dan gerakan sosial. Studi akan dilakukan terhadap gerakan sosial Jelantah4Change.

METODE PENELITIAN

Studi mengenai gerakan sosial tumbuh bak ‘cendawan di musim hujan’ dalam beberapa dekade terakhir ini. Studinya pun lintas disiplin, mulai dari sosiologi, ilmu politik, geografi, sejarah, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, hingga lainnya (Della Porta, 2018). Dinamika dalam studi gerakan sosial ini kemudian melahirkan kebutuhan akan metodologi penelitian empiris yang variatif.

Seiring waktu, muncul berbagai pendekatan dalam melakukan studi terkait gerakan sosial. Setiap pendekatan tersebut berpotensi menebalkan pengetahuan peneliti (Johnston, 2014). Kesahihan satu metodologi penelitian bisa dibuktikan dari kemampuannya menjauhkan sebuah studi dari pendapat atau kepentingan pribadi peneliti. Dengan menggunakan metodologi yang sudah mapan, peneliti bisa dengan mudah memitigasi potensi bias yang cenderung mereduksi kualitas sebuah penelitian.

Adalah sebuah kelaziman, jika sebuah hasil studi mengundang perdebatan. Jika ada peneliti yang tidak setuju dengan satu hasil penelitian. Maka, biasanya, peneliti menguji ketepatan metode penelitian yang dipakai dalam studi tersebut. Terkait itu, sudah menjadi keharusan peneliti untuk menuliskan pendekatan penelitian yang dipakai dalam setiap publikasi hasil studinya.

Berkenaan dengan itu, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dalam melakukan studi terkait relasi antara gerakan Jelantah4Change dan otoritas politik. Melalui penelitian kualitatif, Basrowi & Suwandi (dalam Fadli, 2021) menuturkan, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Proses penelitian dalam metode kualitatif umumnya melibatkan

pertanyaan-pertanyaan yang selalu berkembang, pengumpulan data berdasarkan perspektif informan, analisis data secara induktif, dan interpretasi peneliti terhadap data-data penelitian. Mengingat, data-data penelitian yang didapat umumnya berupa kata-kata atau gambar dari dokumen, hasil observasi, dan transkrip wawancara.

Adapun metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena dengan penafsiran yang tepat. Moleong (dalam Prihartono, 2016) mengungkapkan, penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis, atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui observasi ke salah satu lokasi pengumpulan Jelantah di Tangerang Selatan. Kemudian, untuk menguatkan observasi, peneliti melakukan wawancara *online* dan *offline* terhadap lima narasumber. Yakni, Johannes Anton Witono (founder Jelantah4Change), Fitri Febriyanti (co-founder), Rina (relawan di Ciledug, Tangerang), Qonita (relawan di Pondok Aren, Tangerang Selatan), dan Heny (relawan di Kelapa Dua, Tangerang). Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk melengkapi observasi dan wawancara. Adapun dokumen berbentuk berita, baik *online* maupun *offline*, jurnal relevan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Secara keseluruhan, proses penelitian dijalani sepanjang Januari 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jelantah4Change

Minyak goreng termasuk satu dari sembilan bahan pokok di Indonesia. Mengingat, mayoritas masyarakat Indonesia menyukai makanan yang digoreng. Hal ini kemudian melahirkan sejumlah kebiasaan buruk. Diantaranya, penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang yang membahayakan kesehatan, maraknya praktek daur ulang jelantah yang tidak bertanggung jawab, dan pencemaran lingkungan akibat limbah jelantah.

Atas dasar itulah, Johanes Anton Witono berinisiatif mendirikan Jelantah4Change (J4C), pada 26 Desember 2015. Komunitas peduli terhadap pengelolaan minyak goreng bekas pakai ini berada di bawah Yayasan Terang Nusantara Hijau. Mereka visi mewujudkan manusia yang sehat dan sejahtera di bumi yang hijau. Untuk mewujudkan itu, mereka memiliki setidaknya tiga misi utama. Pertama, melakukan edukasi ke masyarakat tentang pemakaian minyak goreng yang benar dan bahaya penggunaan jelantah yang berulang. Kedua, melakukan pengelolaan jelantah dengan benar, sesuai regulasi, sehingga mampu menekan tingkat pencemaran lingkungan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat atau mendorong partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan limbah jelantah untuk peningkatan kualitas hidup.

Dua tahun pertama sejak didirikan, Jelantah4Change memfokuskan berbagai kegiatannya hanya di sekitar Balikpapan dan Samarinda. Dalam periode itu, berdasarkan data Yayasan Terang Nusantara Hijau (2018), komunitas Jelantah4Change telah melaksanakan 28 kegiatan sosialisasi, kunjungan pabrik, dan pelatihan yang melibatkan sekitar seribu partisipan. Selain itu, Jelantah4Change juga telah memiliki lebih dari 100 jelantah heroes—istilah untuk relawan—yang tersebar di Balikpapan, Samarinda, Kutai Barat, Sanga-Sanga, dan sekitarnya. Dari ratusan relawan itu, Jelantah4Change berhasil mengumpulkan sekira 3.450 liter jelantah yang berasal dari rumah tangga, restoran, pedagang kecil, dan lainnya. Minyak goreng bekas pakai yang terkumpul itu disalurkan ke produsen biodiesel berbahan baku jelantah yang terdapat di Surabaya. Hasil penjualan jelantah itu kemudian dimanfaatkan untuk menyelenggarakan aksi sosial berbentuk donasi buku ke rumah baca dan beasiswa untuk anak kurang mampu.

“Di maret 2016, dengan konsep masih amburadul berupa coretan saja dari teman-teman di Balikpapan, kami launching di facebook. Dua tahun pertama kami di Kalimantan Timur saja. kami mulai belajar edukasi orang, ngumpulin jelantah, lalu cari kerja sama sampai ngirim dan bisa bikin kegiatan sosial. Sejak tahun pertama, sebenarnya sudah banyak yang nanya ada nggak di kota A dan B, cuman kami masih bertahan. Kami belum mau punya relawan. Buat apa? Kami masih belajar membuat sistem,” kata Pendiri Jelantah4Change, Johanes Anton Witono saat wawancara online, Januari 2022.

Seiring berjalan waktu, Jelantah4Change mulai melebarkan sayapnya ke berbagai wilayah di Indonesia. Komunitas ini resmi memiliki relawan pertama di luar Kalimantan Timur pada 2018. Relawan kemudian terus bertambah lewat jalur pertemanan. Per Juli 2020, Jelantah4Change telah memiliki perwakilan di sebelas provinsi dan 30 kabupaten atau kota di Tanah Air. Untuk menggenjot jumlah relawan, Jelantah4Change untuk pertama kalinya melakukan open recruitment melalui akun media sosialnya, pada Juni 2021. Ketika itu, Jelantah4Change mensyaratkan individu yang ingin menjadi relawan berusia 20-50 tahun, memiliki jiwa sosial, dan tertarik untuk terlibat dalam aksi peduli lingkungan. Hingga akhir masa open recruitment, Jelantah4Change mendapatkan sebanyak 81 calon relawan yang berasal dari berbagai wilayah di Tanah Air. Sebanyak 43 orang calon relawan diantaranya diketahui sudah menjadi kolektor jelantah sebelumnya.

“Relawan pertama di Solo. Official relawan pertama di luar Kalimantan Timur. Kemudian dia mengajak temannya di Jogjakarta, Semarang, dan lain lain. Nggak ada yang dijanjiiin, walaupun ada uang honor untuk ngurusin medsos atau uang untuk jemput jelantah. Awal-awal masih pakai uang pribadi,” kata Anton.

Sebagai sebuah gerakan sosial, Jelantah4Change memang memiliki keunikan yang terletak di tiga kegiatan utama mereka yang saling berhubungan. Yakni, edukasi, pengumpulan jelantah, dan aksi sosial.

Komunitas ini memang gencar melakukan edukasi kepada masyarakat akan bahaya jelantah terhadap kesehatan dan lingkungan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan tergerak untuk mengubah kebiasaannya dari pengguna minyak goreng secara berulang yang notabene tidak sehat atau membuang bekas pakainya ke lingkungan secara sembarangan menjadi pengumpul jelantah dan menyerahkannya ke pengolah yang bertanggung jawab. Sebab, tak sedikit pengolah yang mendaur ulang jelantah menjadi minyak goreng curah.

Terkait itu, selain menjadi edukator, relawan Jelantah4Change juga bisa bertindak sebagai penyalur minyak goreng bekas pakai dari masyarakat ke pihak ketiga untuk diolah menjadi komoditas ekonomi. Komunitas ini mengklaim tidak bertindak sebagai pengepul jelantah pada umumnya. Komunitas ini hanya menyalurkan jelantah ke pihak ketiga yang sudah

terbukti mengolah minyak goreng bekas pakai dengan benar dan sesuai regulasi. Dengan kata lain, mereka memastikan jelantah tidak diolah kembali menjadi minyak goreng curah. Praktik daur ulang ini biasa terjadi pada jelantah restoran dan hotel yang dibeli oknum pengepul nakal untuk dijernihkan kemudian dijual ke pedagang gorengan kaki lima. Sejak berdiri enam tahun silam, volume jelantah yang dikumpulkan Jelantah4Change terus meningkat. Awalnya hanya lima belas liter pada 2015, naik menjadi 1.250 liter (2016) dan 5.659 liter (2019).

Dalam hal pengumpulan ini, Jelantah4Change memiliki kebijakan hanya akan membayar jelantah yang berasal dari grup atau komunitas. Sebaliknya, mereka tidak menebus jelantah yang berasal dari perorangan. Dengan kata lain, jelantah yang diberikan oleh individu harus bersifat donasi atau sumbangan. Sebagai gantinya, uang hasil penjualan jelantah ke pihak ketiga digunakan Jelantah4Change untuk mendanai aksi sosial.

“Sampai hari ini, kami nggak pernah declare di publik bahwa kami beli jelantah. Prinsip yang kami pegang adalah kami tidak mau bayar untuk jelantah dari individu atau rumah tangga. Tetapi kalau individu itu ngajakin satu RT untuk setor jelantah ke kami, lalu minta uang penjualannya akan kami berikan dalam jumlah yang besar, 70 persen-80 persen. Di Balikpapan ada warung makan selalu nyetor jelantah, nggak minta apa-apa. Kami pun bikinin dia program aksi sosial, bagi-bagi sembako,” kata Anton.

Kendati tidak membeli jelantah yang disalurkan oleh individu. Namun, Jelantah4Change tidak menutup kemungkinan untuk mengganti atau membayar biaya pengiriman jelantah.

“Mas kumpulin dulu saja jelantahnya, paling nanti pakai Gojek ke tempat saya. Nanti coba kami cek untuk biayanya. Kalau bisa kami cover, nanti bisa dari kami biayanya,” kata Heny, relawan yang bergerak di area Kelapa Dua, Tangerang lewat aplikasi WhatsApp, 23 Januari 2022.

Keunikan-keunikan yang dimiliki Jelantah4Change seperti telah diurai di atas menjadi daya tarik individu untuk menjadi relawan. Ini seperti diceritakan Rina, relawan Jelantah4Change di Ciledug (Tangerang) ketika diwawancara secara online pada 19 Januari 2022. Sebagai pemilik restoran yang peduli akan kesehatan dan lingkungan, Rina enggan menggunakan minyak goreng yang sama secara berulang. Rina juga sangat selektif dalam

menyalurkan minyak goreng bekas pakai restorannya. Dia tidak mau jelantahnya didaur ulang menjadi minyak goreng.

“Ngumpulin jelantah itu berisiko. Banyak yang hubungin saya mau membeli jelantah dengan harga mahal. Kayak sekarang, saat harga minyak goreng mahal banyak yang sanggup beli jelantah 10 ribu per liter. Saya curiga, karena dengar-dengar ada orang mendaur ulang jelantah untuk dipakai lagi. Saya cek di media sosial, ada Jelantah4Change yang tidak hanya ngumpulin jelantah, tapi dananya juga dipakai untuk kegiatan sosial,” kata Rina yang sudah menjadi relawan sejak 2018.

Dalam perjalanannya, Jelantah4Change pun berusaha untuk melibatkan masyarakat lebih jauh. Masyarakat tidak hanya sekedar menyumbang, tetapi juga ikut mengelola jelantah menjadi produk bernilai ekonomis. Pada Desember 2018, komunitas ini menjalin kerja sama dengan Pertamina Refinery Unit (RU) V untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis jelantah di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat Balikpapan yang masih membuang jelantah ke perairan. Ini lantaran mereka masih berpandangan bahwa laut adalah tempat sampah yang luas.

Program pemberdayaan diawali dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya limbah jelantah dan potensi ekonomi dibalik pengelolaan minyak goreng bekas pakai tersebut. tahap selanjutnya, masyarakat diberikan pelatihan cara membuat lilin berbahan dasar jelantah. Selain itu, masyarakat pun diajarkan metode pemasarannya. Tak pelak, kegiatan ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam pengumpulan jelantah di lingkungannya. Ini terbukti dari peningkatan volume limbah jelantah yang terkumpul, awalnya hanya mencapai 300 liter pada 2019 bertambah menjadi 787 liter sepanjang Januari hingga pertengahan 2020.

Dilihat dari perjalanannya, Jelantah4Change bergulir seperti bola salju. Gerakan ini berpotensi membesar jika bisa melibas rintangan dan tantangan yang ada di depannya. Kelebihan gerakan ini ada pada relawannya yang tersebar. Sayangnya, tidak semua relawan seirama bergerak. Ada relawan yang berprofesi sebagai dosen bisa menggerakkan mahasiswanya untuk menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, warga hanya diminta untuk mendonasikan jelantahnya. Namun, ada juga relawan ibu

rumah tangga yang sejak bergabung dengan Jelantah4Change belum aktif bergerak.

“Saya belum berani mengajak untuk mengumpulkan jelantah, karena ibu-ibu sekitar sini jauh lebih tua dari saya. Kebanyakan seumuran ibu saya,” kata Qonita saat ditemui di rumahnya yang dijadikan lokasi penerimaan sedekah jelantah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, 31 Januari 2022.

Diakui Co-Founder J4C Fitri Febriyanti, pihaknya belum memiliki sistem yang bisa Mendorong relawan untuk terus aktif bergerak.

“Kelebihan gerakan kita itu pada edukasi ke masyarakat, tapi karena kita menjalankan aktivitas kerelawanan, maka kita tidak bisa memaksa teman-teman relawan untuk aktif terus menerus. Adanya komunitas ini juga untuk saling menguatkan sesama relawan,” kata Co-Founder Jelantah4Change Fitri Febriyanti saat wawancara online, 19 Januari 2022.

Jelantah4Change perlu merapikan organisasinya dan membangun sistem yang bisa mengoptimalkan keunggulan relawan yang jumlahnya terus bertambah. Jika sistem ini tidak terbangun, dikhawatirkan relawan yang tersebar itu akan seperti buih di lautan.

“Kami memang belum punya sistem yang proven, masih mengandalkan individu. cenderung beberapa relawan yang memang background atau misinya sudah kuat biasanya bisa berjalan dengan mandiri,” kata Anton.

Peran Pemerintah: Harapan dan Realita

Dalam hal menyelamatkan lingkungan dan kesehatan masyarakat dari bahaya jelantah, gerakan sosial tidak bisa bergerak sendiri. Mereka memerlukan keterlibatan pemerintah sebagai lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melindungi segenap Bangsa Indonesia.

Pemerintah dituntut untuk membentuk ekosistem dari hulu hingga hilir terkait pengelolaan jelantah. Sayangnya, pemerintah terlihat belum serius dalam membentuk ekosistem tersebut. Di hulu, belum ada regulasi yang mewajibkan masyarakat mengumpulkan jelantah. Secara de facto, pemerintah memang menganggap bahwa jelantah adalah limbah berbahaya. Namun, secara de jure, belum ada regulasi nasional yang mengatur pengelolaan limbah jelantah. Kebijakan terkini berupa Peraturan Pemerintah

No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tidak secara spesifik meregulasi used cooking oil (Perdana, 2021). Dalam aturan tersebut, jelantah tidak masuk ke dalam daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Atas dasar itu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendorong pemerintah untuk memasukkan jelantah ke dalam kategori limbah B3 (Siaran Pers GIMNI, 12 Agustus 2021). Jika itu terjadi, sebagaimana limbah B3 lainnya, maka setiap orang yang menghasilkan jelantah wajib melakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat wajib mengumpulkan jelantah yang dihasilkan untuk kemudian disalurkan ke pengepul atau pengolah jelantah yang sudah mendapat izin pemerintah. Dengan demikian, penyelewengan pengelolaan jelantah yang bisa membahayakan kesehatan dan lingkungan bisa dihentikan.

Berdasarkan penelusuran, setidaknya baru dua pemerintah daerah yang telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan Jelantah. Yaitu, DKI Jakarta yang menerbitkan Peraturan Gubernur No. 167/2016 tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng. Regulasi daerah tersebut menjabarkan rantai pasok pengelolaan jelantah (Jachryandestama et al., 2021). Kemudian, Kota Bogor yang membuat Peraturan Daerah No. 1/2014 tentang Perlindungan Kota dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kusrini et al., 2018).

Di hilir, pemerintah belum serius menggarap potensi ekonomi dari jelantah. Banyak negara sudah memanfaatkan jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Sementara Indonesia baru sebatas menjadi pemasok jelantah untuk negara-negara tersebut. Seandainya Indonesia bisa optimal mengolah jelantah menjadi biodiesel, maka efek sirkular ekonomi yang dirasakan masyarakat bisa lebih tinggi ketimbang sekadar ekspor bahan mentah.

Teknologi pengolahan jelantah menjadi biodiesel bisa dilakukan oleh industri kecil. Ada beberapa pabrik biodiesel berbasis jelantah yang tumbuh di sejumlah daerah di Indonesia. Sayangnya, Sebagian besar tidak bisa optimal atau bahkan berhenti beroperasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, sepanjang 2014-2018, kontribusi biodiesel berbasis minyak jelantah sebesar 2.765 kilometer. Setelahnya, produksi

kemudian berhenti karena faktor keterbatasan bahan baku dan tingginya biaya produksi (EBTKE, 2021). The International Council on Clean Transportation (ICCT) menilai bahwa ketidakberlanjutan produksi biodiesel berbasis jelantah disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang tidak mampu menjaga eksistensi produsen-produsen bahan bakar nabati berskala kecil tersebut. Ini lantaran pemerintah belum terlalu dalam memahami potensi dari industri biodiesel berbasis jelantah (Kharina et al., 2018).

Pembahasan

Interaksi antara aktor pemerintah dan gerakan sosial seringkali digambarkan berlawanan. Gerakan sosial kerap mengambil jarak dengan negara lantaran mereka menganggap otoritas politik bersifat tidak demokratis dan despotik (Evers & Holloway dalam Steyn, 2012).

Namun, Giugni & Passy (1998) juga berpendapat bahwa gerakan sosial juga bisa bekerja sama dengan negara dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Asalkan, persoalan yang diangkat gerakan sosial tersebut tidak membahayakan atau mengancam otoritas negara. Dalam hal ini, persoalan lingkungan merupakan salah satu domain yang memungkinkan terjadi kolaborasi antara pemerintah dan gerakan sosial.

Limbah jelantah yang tak dikelola secara benar telah lama menjadi persoalan sosial karena membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tidak bisa dimungkiri, pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di sisi lain, muncul gerakan sosial semacam Jelantah4Change yang bertujuan mendorong perubahan di masyarakat terkait cara pandang dan pengelolaan jelantah.

Berdasarkan itu, secara teori, pemerintah sebenarnya bisa menggandeng Jelantah4Change yang memiliki relawan tersebar setidaknya di sebelas provinsi dan 30 kabupaten/kota di Indonesia. Namun, pada praktiknya, pemerintah pusat belum terlihat mendorong kolaborasi tersebut terjadi di seluruh Indonesia. Hanya sedikit pemerintah daerah yang berinisiatif untuk bekerja sama dengan Lembaga sosial dalam mengelola

limbah jelantah. Semisal, DKI Jakarta yang menggandeng lembaga sosial yang bergerak dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF).

Selain itu, ada juga pemerintah daerah yang bergerak sendiri dalam mengelola jelantah. Seperti Pemerintah Kota Bogor yang bergerak mengumpulkan jelantah dari rumah tangga, sekolah, kantor pemerintahan, dan industri untuk diolah menjadi biodiesel. Selanjutnya, biodiesel tersebut digunakan sebagai bahan bakar bus TransPakuan, transportasi umum yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bogor. Sayangnya, program itu hanya bertahan tujuh tahun, 2008-2015, lantaran biodiesel jelantah yang dihasilkan di bawah standar nasional sehingga menimbulkan kerusakan pada mesin bus Transpakuan (Kharina et al., 2018).

Sejak berdiri enam tahun silam, Jelantah4Change juga belum pernah berkolaborasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sejauh ini, mereka baru bekerja sama dengan Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan. Kolaborasi tersebut dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat. Tujuan pemberdayaan tersebut tercermin dari nama kolaborasi: Mariojela yang merupakan singkatan dari Margasari olah jelantah. Pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pada Desember 2018 tersebut bisa terwujud lantaran sejalan dengan komitmen *corporate social responsibility (CSR)* yang sudah digaungkan Pertamina RU V di Balikpapan sejak 2008. Perusahaan migas pelat merah itu ingin membentuk kampung mandiri energi di sekeliling ibu kota Kalimantan Timur.

Meski Jelantah4Change menegaskan masih bisa bergerak mandiri. Namun, mereka tetap mengakui peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperkuat gerakan sosial penyelamatan lingkungan. Salah satu kontribusi pemerintah yang ditunggu adalah membuat kebijakan untuk mencegah penyelewengan pengelolaan jelantah. Dalam hal ini, pemerintah bisa mengawalinya dengan memasukkan jelantah ke dalam regulasi yang memuat daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa mengolah jelantah.

Berdasarkan uraian di atas, relasi antara pemerintah dan gerakan sosial Jelantah4Change pada umumnya baru bersifat konsensus. Menurut Giugni dan Passy (1998), konsensus merupakan satu dari dua bentuk interaksi antara pemerintah dan gerakan sosial yang berbasis *agreement* atau kesepakatan atas penyelesaian atau solusi terhadap suatu isu. Jika *agreement* tersebut baru sebatas di level wacana atau diskursus, maka relasi yang terbangun antara pemerintah dan gerakan sosial bersifat konsensus. Seandainya, *agreement* antara pemerintah dan gerakan sosial sudah terwujud dalam bentuk *action* atau tindakan, maka relasi antara keduanya sudah bisa disebut sebagai *cooperation* atau kerja sama.

Sejatinya, saat ini momentum yang tepat bagi pemerintah membangun kolaborasi aktif dengan gerakan sosial untuk mengelola limbah jelantah. Sebab, dibalik bahaya jelantah ada potensi bisnis menggiurkan yang jika dioptimalisasi bisa menggerakkan perekonomian rakyat menambah lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penerimaan negara. Banyak negara yang belakangan tertarik mengolah jelantah menjadi biodiesel. Mereka pun membeli jelantah dari Indonesia. Di sisi lain, mereka juga mulai menyetop impor minyak sawit mentah Indonesia dengan alasan deforestasi.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K dan Traction Energi Asia (2019), berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2019, menunjukkan bahwa minyak jelantah yang dijual ke luar negeri mencapai 148,38 ribu ton atau 184,09 ribu kiloliter dengan nilai mencapai 90,23 juta dolar Amerika Serikat. Sebelum 2019, ekspor minyak jelantah Indonesia memang dalam tren meningkat. Pada 2014, ekspor jelantah hanya berkisar 55 ribu ton dengan nilai USD 45,83 juta. Kemudian merangkak naik menjadi 63,979 ton senilai USD 38,24 juta pada 2015, lalu 104.697 ton senilai USD 64,71 juta (2016). Kemudian, 122.104 ton senilai USD 81,26 juta (2017), dan 123.752 ton senilai USD 72,81 juta (2018). Adapun negara tujuan utama ekspor jelantah Indonesia adalah Belanda yang nilai penjualannya mencapai USD 23,6 juta. Diikuti oleh Singapura (USD 22,3

juta), Korea Selatan (USD 10,6 juta), Malaysia (USD 10,5 juta), dan China (USD 3,6 juta).

Dengan gambaran seperti itu, pemerintah sudah seharusnya mendorong hilirisasi jelantah menjadi biodiesel. Menjual produk turunan jelas memiliki keuntungan lebih ketimbang sekadar mengekspor bahan mentah. Selain itu, biodiesel dari minyak jelantah mempunyai mutu yang baik untuk digunakan sebagai bahan bakar karena memenuhi Standar Biodiesel Indonesia (Syamsidar, 2013). Pengolahan jelantah menjadi biodiesel dapat menghemat biaya produksi 35 persen dibandingkan dengan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit mentah (TNP2K & Traction Energi Asia, 2019). Secara umum, potensi pemanfaatan CPO menjadi biodiesel sangat besar untuk Indonesia, antara lain sebagai bahan bakar kendaraan, mesin pada industri sampai dengan pembangkit tenaga listrik. Biodiesel memiliki kelayakan secara matematis untuk diproduksi (Tety *et al.*, 2012). Selain itu, biodiesel lebih ramah lingkungan lantaran menghasilkan emisi karbondioksida lebih kecil ketimbang bahan bakar fosil.

Sejauh ini, pemerintah belum membentuk ekosistem yang bisa menumbuhkan produsen-produsen biodiesel jelantah skala kecil. Sejumlah produsen-produsen kecil yang sudah ada tidak maksimal atau bahkan berhenti beroperasi karena kesulitan bahan baku dan kehilangan pasar. Ini seperti dialami oleh dua produsen jelantah, PT Bumi Energi Ekuatorial di Bogor dan Yayasan Lengis Hijau di Denpasar (Harahap & Yulia, 2018).

Wajar saja jika pabrik biodiesel kesulitan bahan baku. Sebab, jelantah yang terkumpul dari masyarakat masih sedikit. TNP2K dan Traction Energi Asia (2019) mencatat, Indonesia baru mampu menghimpun sebanyak 3 juta kiloliter jelantah atau hanya 18,5 persen dari total konsumsi minyak goreng sawit nasional. Sebanyak 1,6 juta kiloliter diantaranya berasal dari rumah tangga di berbagai kota besar di Tanah Air.

Dari sekitar 3 Juta kiloliter minyak jelantah yang terkumpul, kurang dari 570 ribu kiloliter yang dimanfaatkan sebagai biodiesel maupun untuk kebutuhan lainnya. Sebagian besar sisanya digunakan untuk minyak goreng

daur ulang dan ekspor. Menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI (2021) jelantah yang didaur ulang berkisar 1,95 juta ton atau 2,43 juta kiloliter atau setara 15-20 persen dari total *market share* minyak goreng nasional.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, pemerintah perlu berkolaborasi dengan gerakan sosial untuk mengedukasi masyarakat dan mengampanyekan pengumpulan jelantah. Masyarakat bisa menyalurkan jelantah tersebut ke bank sampah resmi atau pihak ketiga yang sudah mendapat izin pemerintah. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk pabrik biodiesel bisa terjaga. Di sisi lain, potensi jelantah didaur ulang oleh oknum nakal menjadi minyak goreng yang berbahaya bagi kesehatan bisa ditekan.

KESIMPULAN

Limbah minyak goreng bekas atau jelantah terbukti membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan masalah limbah tersebut. Sebab, pemerintah diamanatkan oleh konstitusi untuk melindungi segenap rakyatnya. Di sisi lain, persoalan yang dihadapi pemerintah tidak hanya limbah saja. Banyak persoalan lain yang tak kalah kompleks yang muncul seiring perkembangan masyarakat. Pemerintah seringkali tidak optimal dalam menyelesaikan satu persoalan. sebab, jumlah persoalan yang muncul tidak berbanding lurus dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah.

gerakan sosial muncul sebagai suatu aksi kolektif di luar institusi-institusi mapan yang bertujuan membuat perubahan kultural di masyarakat. Seperti Jelantah4Change yang bergerak mengedukasi masyarakat akan pentingnya mengolah limbah jelantah. Sejak berdiri enam tahun silam, gerakan berbasis kerelawanan ini masih bergerak sendiri. Mereka belum pernah berkolaborasi dengan pemerintah.

Jika dideskripsikan dengan menggunakan perspektif Giugni & Passy (1998), interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan Jelantah4Change bersifat konsensus. Artinya, pemerintah sejatinya memiliki *agreement* atau kesepakatan yang sejalan dengan Jelantah4Change mengenai bahaya

jelantah dan potensi ekonomi dibaliknya. Namun kesepahaman tersebut baru terjadi di tingkat wacana (discourse). Maka, untuk menuntaskan persoalan limbah jelantah, *agreement* antara pemerintah dan gerakan sosial perlu dielaborasi ke dalam aksi nyata. Di level ini, menurut Giugni & Passy, interaksi atau relasi yang terjadi antara pemerintah dan gerakan sosial sudah berbentuk kerja sama (cooperative).

Namun, sebelum kerja sama konkret itu terjadi, Jelantah4Change juga perlu memerkuat internal organisasinya dengan sistem kerja yang mumpuni. Mengingat, jumlah relawan yang terus membesar belum berbanding lurus dengan kemampuan Jelantah4Change menyadarkan masyarakat untuk mengumpulkan minyak goreng bekasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, A. and Fatmawati, F. 2019. "Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi Dan Lilin Hias Untuk Meminimalisir Minyak Jelantah Bagi Masyarakat Kelurahan Pantai Amal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 3(2), pp.31-40.
- Admin. 2021. Gimni Usulkan minyak jelantah dikategorikan B3. Retrieved January 19, 2022, from <https://gimni.org/gimni-usulkan-minyak-jelantah-dikategorikan-b3/>
- Advent, R., Zulgani, Z. and Nurhayani, N. 2021. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia Tahun 2000-2019." *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 9(1), pp.49-58.
- Alatas, A. 2015. "Trend produksi dan ekspor minyak sawit (CPO) Indonesia." *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(2), pp.114-124.
- Ardhany, Syahrida Dian, and Lamsiyah Lamsiyah. 2018. "Tingkat Pengetahuan Pedagang Warung Tenda di Jalan Yos Sudarso palangkaraya Tentang Bahaya Penggunaan minyak jelantah bagi kesehatan." *Jurnal Surya Medika*, 3(2), 62-68. <https://doi.org/10.33084/jsm.v3i2.99>.
- Asfianur, S.I.F., Saleh, M.H. and Abdullah, Z. 2020. "Gerakan Sosial Sangasanga Melawan (Studi Tentang Penyelamatan Lingkungan dari Eksplorasi Tambang di Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanagara)." *e-Journal Pemerintahan Integratif*, 8 (3): 917-928.
- Badrun, U. 2019. "Social Movement based on Religiosity as a New Model

- of Social Movements in Jakarta (The 212 Social Movement in Jakarta 2016)." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4), pp.254-272.
- Bakar, Abu, Amri Adha Arifin, and Sunardi Sunardi. 2019. "Good Governance dan Gerakan Sosial: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar." *Sosioreligius*, 4.2.
- Cahyono, E.T., 2022. "Kepemimpinan Efektif Bagi Generasi Milenial." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), pp.641-651.
- Christiansen, Jonathan. 2011. "Narrative & Social Movement." Pp. 3-13. In *Theories of Social Movement*. 1st ed. Essay, Salem Press.
- Della Porta, D. 2018. "Protests as critical junctures: some reflections towards a momentous approach to social movements." *Social Movement Studies*, vol. 19, no. 5-6, pp. 556-575.
- EBTKE. 2020. Minyak Jelantah: Sebuah Potensi Bisnis Energi yang Menjanjikan. Retrieved January 19, 2022, from <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/12/07/2725/minyak.jelantah.sebuah.potensi.bisnis.energi.yang.menjanjikan>
- Ermawati, T. and Saptia, Y. 2013. "Kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(2), pp.129-148.
- Fadli, M.R. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), pp.33-54.
- Fatia, D. and Sugandi, Y.S. 2019. "Gerakan Tanpa Sedotan: Hindari Kerusakan Lingkungan." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), pp.66-75.
- Fitriyah, N.R. and Pribadi, F. 2020. Perang Diskursus Muslimah Feminis di Instagram. *Paradigma*, 9(1).
- Giugni, Marco G & Florence Passy. 1998. "Contentious politics in complex societies: New social movements between conflict and cooperation." Pp. 81-107. In *From contention to democracy. essay*, Rowman & Littlefield.
- Harahap, J. and Yullia, Y. 2018. "Potensi Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Kota Banda Aceh Sebagai Sumber Energi Alternatif (Biodiesel)." *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology*, 4(2), pp.151-164.
- Hapsari, D.R., 2016. "Peran jaringan komunikasi dalam gerakan sosial untuk pelestarian lingkungan hidup." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(1), pp.25-36.
- Indrawijaya, A., Loekman, A., Gafli, G., Fadhillah, F., Maharani, C., Rachmanto, F., & Syauta, R. 2020. "Sedekah Jelantah: Sebuah Inisiatif untuk Mempromosikan Sistem Waste Management dan untuk Menciptakan Komunitas Mandiri melalui Biofuel." *Jurnal Pengabdian*

Pada Masyarakat, 5(2), 577-586.

- Jachryandestama, R., Fairus, S. and Nursetyowati, P., 2021. "Perancangan Sistem Pengumpulan Minyak Jelantah di Apartemen Bassura City." *Indonesian Journal for Social Responsibility*, 3(02), pp.65-74.
- Johnston, Hank. 2014. "Researching Social Movement." Pp 118-138. In *What is a social movement? essay*, Polity.
- Katadata. 2019. "10 Negara dengan konsumsi minyak sawit terbesar Dunia." Databoks. Retrieved January 18, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/16/10-negara-dengan-konsumsi-minyak-sawit-terbesar-dunia>
- Kharina, A., Searle, S., Rachmadini, D., Kurniawan, A.A. and Priongo, A. 2018. "The potential economic, health and greenhouse gas benefits of incorporating used cooking oil into Indonesia's biodiesel." *White Paper*, 26, p.2018.
- Kodarningsih, Nining Nia. 2019. *Gerakan Sosial Pelestarian Hutan di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Hutan Itu Indonesia (HII)*. Skripsi. FISIP UIN Jakarta.
- Kusrini, N. and Gafur, S. 2018. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pasokan Minyak Goreng Bekas Rumah Makan Menggunakan ISM (interpretive structure modelling) dan MICMAC (cross-impact matrix multiplication applied to the classification)." *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 7(2).
- Perdana, B.E.G., 2021. "Circular Economy of Used Cooking Oil in Indonesia: Current Practices and Development in Special Region of Yogyakarta." *Journal of World Trade Studies*, 6(1), pp.28-39.
- Prihartono, A.W. 2016. "Surat kabar & konvergensi media (studi deskriptif kualitatif model konvergensi media pada Solopos)." *Jurnal Channel*, 4(1), pp.105-106.
- Rahayu, S., Aliyah, H., Tukasno. 2020. "Pemanfaatan Minyak Jelantah dan Arang Kayu untuk Membuat Sabun Daur Ulang." *Jurnal Pengabdian KITA*, Vol. 3, No. 1.
- Rahman, Adi. 2018. *Dinamika Gerakan Sosial Masyarakat Samarinda dalam Memperjuangkan Keadilan Lingkungan (Studi Kasus Pada "Gerakan Samarinda Menggugat" Di Kalimantan Timur)*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(1).
- Steyn, Ibrahim. 2012. "The state and Social Movements: Autonomy and its pitfalls." Pp 331-351. *Politikon*, 39(3). doi:10.1080/02589346.2012.746184.
- Syamsidar, H.S. 2013. "Pembuatan dan uji kualitas biodiesel dari minyak jelantah." *Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi*, 7(2), pp.209-218.

- Tety, E., Hutabarat, S., & Putra, F. M. 2012. "Prospek Komoditas Minyak Kelapa Sawit (CPO) dalam Pengembangan Biodiesel Sebagai Alternatif Bahan Bakar di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 152–162.
- TNP2K and Traction Energi Asia. (2019). Pemanfaatan Minyak Jelantah untuk Produksi Biodiesel dan Pengentasan kemiskinan di Indonesia. Retrieved January 17, 2022, from <https://tractionenergy.asia/id/paparan-pemanfaatan-minyak-jelantah-untuk-produksi-biodiesel-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia/>
- Yayasan Terang Nusantara Hijau. 2018. Jelantah4Change. Retrieved Januari 20, 2022, From <https://terangnusantara.or.id/portfolio/items/jelantah4change/>